

ABSTRACT

Population administration is related to registration, recording, issuance of an important document of population as well as citizenship, which includes, identity cards, identity cards, family cards, birth certificates, marriage and death. It is the government's obligation to fulfill the civil rights of its citizens, especially for newborn children, obligations must be given regarding the conditions in accordance with their conditions. For example, children of undocumented migrant workers born abroad, cannot register their civil rights because their parents do not have official or fictitious documents, so that they have problems with the status of citizenship and citizenship. With this study aims to examine how the rights and obligations as well as the concept of population administration especially regarding birth registration.

The research method used is normative research. Normative research is carried out by examining library materials or secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The legal material is arranged systematically, examined and then drawn conclusions on the problems under study. Analyze and examine the rights and obligations of the government with its citizens in terms of population administration.

The results obtained from these studies will be used as recommendations for the government or implementing agencies in the field of civil registration, so that children's rights, especially the newborn, to maintain their civil rights, by providing administrative dispensation for children who are administratively problematic in their population documents, specifically for children who are documented migrant workers born abroad.

Keywords: Population Administration, Rights and Obligations, Civil Rights, Citizenship

ABSTRAK

Administrasi kependudukan yaitu berkaitan dengan pendaftaran, pencatatan, penerbitan suatu dokumen penting kependudukan serta kewarganegaraan, yang meliputi, identitas diri, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Hal itu menjadi kewajiban pemerintah guna memenuhi hak sipil warga negaranya, terutama bagi anak yang baru lahir, harus di berikan kewajiban perihal persyaratan yang sesuai dengan kondisinya. Seperti contoh Anak TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri, tidak bisa mendaftarkan hak sipilnya dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai dokumen resmi atau fiktif, sehingga bermasalah pada status kependudukan dan kewarganegaraan anak. Dengan itu penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana hak dan kewajiban serta kosnep administrasi kependudukan khususnya perihal pencatatan kelahiran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam permasalahan yang diteliti. Menaganalisis dan menelaah tentang Hak dan Kewajiban pemerintah dengan warga negaranya dalam hal administrasi kependudukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut nantinya akan dijadikan rekomendasi bagi pemerintah atau instansi pelaksana dibidang pencatatan sipil, agar hak-hak anak, khususnya yang baru lahir, untuk dijaga hak sipilnya, dengan cara memberikan dispensasi administratif bagi anak yang bermasalah secara administratif dokumen kependudukannya, khususnya terhadap anak yang TKI tanpa dokumen yang lahir diluar negeri.

Kata kunci: Adminitrasi Kependudukan, Hak dan Kewajiban, Hak Sipil, Kewarganegaraan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penulis	6
Tabel 1 Perubahan Undang-Undang yang ke -1.....	46
Tabel 1 Perubahan Undang-Undang yang ke -2.....	48

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1. Secara Teoritis.....	5
1.4.2. Secara Praktis	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisa Bahan Hukum	11
1.6. Sisitematika Penulisan.....	12

BAB II Hak Warga Negara Dalam Administrasi Kependudukan Di

Indonesia

2.1. Hak Asasi Anak	13
2.2. Hak Warga Negara	20
2.2.1. Pengertian Warga Negara.....	20
2.2.2. Asas-Asas Kewarganegaraan	21
2.2.3. Problem Status Kewarganegaraan	23
2.2.4. Teori Bernegara	26
2.3. Administrasi Kependudukan	27
2.3.1. Penjelasan Administrasi Kependudukan Dalam Perundang-undangan.....	28

BAB III Kewajiban Pemerintah dan Orang Tua Dalam Administrasi Kependudukan Bagi Anak Tenaga Kerja Indonesia Tanpa Dokumen Yang Lahir Diluar Negeri

3.1. Jaminan Kewajiban Serta Pemenuhan Hak-Hak Anak	31
3.2. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah Serta Orang Tua Dalam Administrasi Kependudukan.....	38
3.3.Persyaratan Dan Teknis Pembuatan, Pencatatan, Dan Penerbitan Akta Kelahiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan	45
3.3.1. Perbedaan Isi Pasal 27 Dan Pasal 32 Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Dan Aturan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan	46
3.3.2. Persyaratan Dan Tata Cara Pencaatan Kelahiran Dalam Peraturan Presiden	50
3.3.3. Teknis Pencatatan Kelahiran Diluar Wilayah Republik Indonesia	52
3.4. Solusi Atas Status Kewarganegaraan Anak Tki Tanpa Dokumen Yang Lahir Di Luar Negeri	56

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	..
-----------------------	-----------